

Islam Damai Versus Kegelisahan Politik (Analisis Pendekatan Teologi)

Nurliana Damanik¹

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; nurlianadamanik@uinsu.ac.id

Received: 24 /10/2024

Revised: 30/11/2024

Accepted: 11/12/2024

Abstract

This study explores the concept of Islamic politics, emphasizing the importance of applying ethical and theological values in contemporary political systems, particularly in Indonesia. The background of this study stems from the modern political challenges faced by the Muslim community, such as corruption, pragmatism, and injustice. The objective is to examine and reinterpret fundamental principles of Islamic politics, such as deliberation (shura), justice, and egalitarianism, to implement them in today's political context. The research employs a library research method, analyzing both classical and contemporary literature on Islamic political thought. The findings indicate that the ethical values of Islamic politics, as taught by the Prophet Muhammad (PBUH) and applied during the classical Islamic governance era, remain relevant in addressing modern political challenges. Furthermore, these values can guide governance toward inclusivity and responsibility. In conclusion, the application of ethical values in Islamic politics offers a viable solution for creating a fair, transparent, and community-oriented political system, presenting an alternative to the pragmatic and morally disconnected tendencies of secular political models.

Keywords

Islamic Politics; Deliberation (Shura); Justice; Egalitarianism; Islamic Ethical Values

Corresponding Author

Nurliana Damanik

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; nurlianadamanik@uinsu.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dinamika politik selalu menjadi perbincangan yang menarik bagi kalangan masyarakat yang negaranya menggunakan sistem demokrasi karena mereka mengetahui manuver pelaku politik yang memegang kekuasaan dalam mengambil kebijakan, terkadang timbul pro dan kontra sehingga demonstrasi terjadi di berbagai tempat untuk mendukung pemerintah atau menolak kebijakan tersebut. Dinamika politik selalu menjadi perbincangan yang menarik bagi kalangan masyarakat yang negaranya menggunakan sistem demokrasi karena mereka mengetahui manuver pelaku politik yang memegang kekuasaan dalam mengambil kebijakan, terkadang timbul pro dan kontra sehingga demonstrasi terjadi di berbagai tempat untuk mendukung pemerintah atau menolak kebijakan tersebut. Tapi terkadang masyarakat tidak terobsesi untuk mendiskusikan masalah politik, mereka merasa



pesimis dan krisis kepercayaan kepada pemerintah karena kebobrokan moral para pejabat yang banyak melakukan korupsi, nepotisme, tidak berlaku adil dan berpikir pragmatis untuk memperkaya diri.

Dengan melihat fenomena di atas bahwa politik menjadi solusi yang mendasar dalam memecahkan problem suatu negara untuk menuju seperti yang diharapkan Islam yaitu *baldatun toyyibatun warobbun ghofur*, sehingga pada abad 19 M mulai dicetuskan disiplin ilmu politik yang menjadi salah satu cabang ilmu sosial, yang berdampingan dengan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi. Ilmu politik secara tidak langsung termasuk ilmu yang tua dalam peradaban manusia, seperti yang diungkapkan Roger F Soltau dalam *Introduction to Politics* berpendapat bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lainya. Manusia termasuk makhluk sosial yang komunal sehingga secara tidak langsung berpikir dalam mempertahankan hidup yang lebih baik.

Kalau kita melihat pada masa Nabi Muhammad pada periode Madinah secara implisit ada unsur-unsur politik untuk memodifikasi umat Islam dan non Islam supaya hidup mereka damai, sejahtera, dan aman karena pada saat itu Nabi menjadi pemimpin negara sekaligus utusan Allah untuk menyebarkan agama Islam sebagai penyempurnaan agama samawi sebelumnya. Dan pada kesempatan ini penulis ingin mengkorelasikan politik menurut kaca mata Islam dan disiplin ilmu yang menyongsong politik tersebut.

2. METODE

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), di mana data diperoleh dari berbagai sumber literatur, termasuk kitab klasik, buku-buku primer, dan referensi ilmiah terkait politik Islam dan dinamika politik kontemporer. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menggali konsep-konsep dasar politik Islam, seperti musyawarah, keadilan, dan egalitarianisme, serta mengaitkannya dengan konteks sosial-politik modern.

Dalam proses analisis, peneliti membandingkan praktik politik di masa Rasulullah SAW dan pemerintahan Islam klasik dengan realitas politik saat ini, khususnya di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam menciptakan sistem politik yang etis dan berkeadilan. Validitas data dijaga melalui triangulasi berbagai sumber literatur untuk memastikan akurasi dan konsistensi interpretasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang relevansi nilai-nilai politik Islam dalam menghadapi tantangan politik kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Damai Dalam Islam

Menurut M. Quraish Shihab, “jika kata salam yang terdapat dalam Q.S al-Qadr 97:5, dipahami sebagai kata keadaan, sifat atau sikap, maka kita dapat berkata bahwa malam tersebut penuh dengan kedamaian yang dirasakan oleh mereka yang memenuhinya atau boleh juga kita berkata bahwa sikap para malaikat yang turun pada malam tersebut adalah sikap yang penuh terhadap mereka yang berbahagia menemuinya”. (Al-Farmawi, 1961). Selanjutnya mengutip pendapat Ibn al-Qayyim dalam kitabnya ar-Ruh yang mengungkap tentang kedamaian dan ketenteraman hati, menjelaskan bahwa hati yang mencapai kedamaian dan ketenteraman mengantar pemiliknya dari ragu kepada yakin, dari kebodohan kepada ilmu, dari lalai kepada ingat, dari khianat kepada amanah, dari riya’ kepada ikhlas, dari lemah kepada teguh atau kokoh dan dari sombong atau tahu diri” (al-Muhtasib, 1973).

1. Qurais Shihab menjelaskan “Nilai-nilai kedamaian dalam Alquran dikenal dengan istilah *salam*, disebutkan bahwa kata salam terulang dalam Alquran sebanyak empat puluh kali”. (Shihab, 1997). “Selanjutnya beliau memberikan penjelasan kata *salam* tersebut, menurutnya kata salam digunakan untuk berbagai maksud, antara lain”:
2. “Sebagai ucapan salam yang bertujuan mendoakan, sebagaimana bunyi surat Az-Zariyat 51:25 yang menceritakan kedatangan malaikat kepada Nabi Ibrahim a.s”.
3. “Menggambarkan sikap mencari selamat dan damai, seperti dalam firman Allah surat Al-furqan/25:63 yang memuji hamba-hamba-Nya yang selalu mencari kedamaian walaupun menghadapi orang-orang yang jahil”.
4. “Keadaan atau sifat sesuatu, dijelaskan QS Al-Maidah 5:16 yang selalu mencari kedamaian walaupun menghadapi orang-orang beriman”.
5. “ Menjelaskan tentang sifat Allah, Q.S al-Hasyr/59:23”. (Shihab, 1997)

“Apa yang dijelaskan merupakan nilai-nilai Qurani yang jika diimplementasikan dalam kehidupan manusia akan mewujudkan suatu masyarakat yang damai dan harmonis. Mereka yang hatinya sudah mencapai kedamaian, tidak terpengaruh dengan berbagai glamornya kehidupan dunia serta berbagai syahwat yang akan menjerumuskannya kepada kehinaan. Bahkan, jika orang-orang bodoh ingin menyapanya dengan maksud mengejek dan menghina orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah swt. tersebut. Tetap berkat santun dan penuh kedamaian sebagaimana ditegaskan”. (al-Muhtasib, 1973) Allah berfirman Q.S Al-Furqan/25:63.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Artinya: “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang damai (salam)”.

Dalam menjelaskan ayat tersebut di atas M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa jiwa ada jahil/bodoh mencela dan mencerca kita hendaknya, kita tidak membalasnya atau menanggapi. Hal ini dalam rangka menghindari kejahatan yang lebih besar lagi sebagai perwujudan dari kemampuan diri untuk mencegah perbuatan yang negatif. Dengan mengutip pandangan Ja'far as-Siddiq dalam memberikan nasihat kepada Unwan r.a yang menyatakan jika ada orang yang mengejek atau mencerca kita, baik apakah cercaan atau makiannya itu kepada kita benar atau salah, kita hendaknya memohonkan ampunan kepada Allah agar si pengejek nanti diberi keampunan atas perbuatannya menghina kita. Sebab, menurut Ja'far As-Siddiq”.(Shihab, 1997) “jika kita menanggapi cercaan orang dengan kalimat yang buruk, itu ibarat membuahi indung telur dengan sperma. Pertemuan keduanya melahirkan kalimat-kalimat buruk lainnya”

B. Definisi Politik

“Dalam masyarakat disebut sebagai masyarakat politik ialah jika ia mempunyai lembaga kekuasaan khusus, yang mampu menetapkan hukum dan undang-undang, yang mana mengatur segala perilaku masyarakat. Hukum dan undang-undang diaplikasikan kepada masyarakat dan selanjutnya memaksa mereka untuk mematuhi aturan tersebut. Kemudian undang-undang tersebut dipatuhi secara umum oleh masyarakat. Selanjutnya diakui sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu masyarakat dan yang mampu memberikan hukuman secara material”. (Quinton, 1967)

Sedangkan, politik tersebut didefinisikan sebagai, ilmu memerintah dan mengatur negara” (Duverger, 2003). Berdasarkan dua teori tersebut, Azyumardi Azra menyebutkan “bahwa politik itu mengkaji dari segi kekuasaan; bagaimana pada akhirnya sampai kepada kekuasaan (baik itu secara sukarela maupun menggunakan paksaan kekuatan) Bagaimana mengaturnya? Bagaimana hubungan individu dengan kekuasaan itu? Politik juga melakukan pengkajian masalah Undang- Undang Dasar yang akan mengatur hubungan-hubungan keorganisasian yaitu antara lembaga- lembaga kekuasaan politik (eksekutif), legislatif, dan yudikatif, serta mengkaji dari segi proses saling mempengaruhi antara lembaga-lembaga kekuasaan yang berkuasa dan aliran-aliran pemikiran yang bergerak di tengah masyarakat (Partai: opini umum, perwakilan, dan kepemilikan). Seluruhnya yaitu masalah-masalah yang dapat masuk dalam lingkup yang biasa dikenal dengan fiqh politik Islam yaitu sebagai *Ahkam Sultaniyah* (hukum tata negara)”.(Nasir, 1957)

C. Pengertian Politik dalam Islam

“Politik disebutkan berasal bahasa Arab yang berarti *siyasah*. Dalam kamus *Lisanul Arab* disebutkan bahwa kata *siyasah* memiliki makna mengurus sesuatu dengan sesuatu yang membuatnya baik atau berarti mengurus suatu perkara sampai pada akhirnya menjadi baik. Politik dijelaskan menurut Ibnu Qayyim dibagi menjadi dua macam, yaitu politik yang diwarnai dengan suatu kezaliman sehingga politik tersebut diharamkan dan yang kedua ialah politik yang diwarnai dengan keadilan yang mana merupakan bagian dari suatu syariat Islam”.

“Politik jika kita lihat dari sisi yang buruk bisa membuat masyarakat memberikan kesimpulan bahwa politik tersebut itu kejam dan para politikus oleh masyarakat dianggap sebagai ahli tipu muslihat yang sangat kental dengan perbuatan makar, dusta, dan licik. Namun, bila ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, ada pula politik yang *syar’i*. Bahkan hal tersebut salah satu cabang dari suatu syariat Islam yang mulia seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam sebuah kitabnya, yaitu *l’lamul Muwaqqi’in*. Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, politik yang *syar’i* disebut sebagai *as-siyasah*”.

Pengertian siyasah yang dikemukakan oleh Ibn A’qil, yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, mengatakan “politik Islam merupakan segala perbuatan yang dapat membuat manusia lebih dekat kepada suatu kemaslahatan. Namun realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideologi (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi netral”.(Nasir, 1957)

Dalam Al Muhith, siyasah berakar kata *sâsa-yasûsu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha* siyasatan berarti *Qama ‘alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Al-Siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya”.(Quinton, 1967)

D. Pertumbuhan Falsafah Politik

Dalam permasalahan pasti ada asal muasal, begitu juga dalam masalah politik dipastikan ada akar yang memulai mendesain karena tujuan politik untuk membuat hidup masyarakat menjadi sejahtera, sebagai mana definisi politik yang diambil dari bahasa Belanda politik dan Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani (politika-yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya (politie-warga negara) dan secara etimologi yaitu kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan dari pemegang kekuasaan akan menentukan nasib masyarakatnya, dan untuk mengeluarkan kebijakan pasti ada falsafah.

Dalam menelusuri genealogi falsafah politik dengan menggunakan analisa manuskrip yang ada maka kita dapat menyimpulkan bahwa falsafah politik pertama telah digagas oleh pemikir-pemikir Yunani seperti Sokrates, Plato, Aristoteles. Dan falsafah politik tidak muncul dengan sendirinya tetapi dipengaruhi perkembangan politik yang sesuai dengan masalah masyarakat.

“Indikasi yang mengatakan bahwa pemikir-pemikir Yunani penggagas falsafah politik karena kajian mereka cenderung kepada sesuatu yang bersifat materi maka sesuatu yang lebih dekat dengan materi yaitu manusia, seperti yang telah diungkapkan Aristoteles, para pemikir Yunani periode pertama sebagian mereka telah membahas masalah materi meskipun diantara mereka juga membahas masalah ketuhanan. (Quinton, 1967)

“Kemudian falsafah politik juga berkembang setelah agama Islam diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad kepada umatnya karena sifat agama Islam menjadi sebuah referensi bagi semua aspek permasalahan- moral, rohaniah, ekonomi, kemasyarakatan, kebudayaan, pemerintahan di tingkat individu atau masyarakat. Sehingga banyak pemikir Islam, ahli fiqh masa salaf yang mengabdikan diri mereka untuk mengeluti politik meskipun tidak secara praktis tetapi menuangkan pemikiran mereka melalui karya supaya bisa menjadi rujukan para pemimpin mereka untuk mengeluarkan kebijakan” seperti:

1. “Abu Yusuf Yacqub (113-182 H/731-798 M), seorang hakim yang terkenal pada zaman Kholifah Harun ar-Rashid yang mempunyai karya Kitab al-Kharaj”.
2. “Abu Hasan al-Mawardi (364-450 H/991-1031 M) penulis kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah (Sembilan peraturan-peraturan mengenai pemerintahan) “. (Salim, 2002)
3. “Al-Ghozali (450-501 H/1058-1111 M) pemikir yang mempunyai pengaruh besar dalam kemajuan keilmuan Islam, dalam karangannya Kitab al-Iqtisad fil-I'tiqod beliau mengutarakan ide-ide masalah imamah yang tidak jauh dengan pemikirannya AL-Mawardi. Tetapi dalam karangannya yang lain beliau menerima kenyataan yang berlaku untuk zamanya demi untuk menyatukan umat Islam”.
4. “Ibnu Taimiyyah (661-728 H/1263-1328 M) penulis kitab As-Siyasah Ash-Syariah fi islah ar-Ra'i war-Raiyyah, beliau yang banyak mempengaruhi pembaruan Islam pada zaman modern”.
5. “Ibnu Kholdun (732-808 H/1332-1405 M) penulis kitab Al-Muqoddimah, karya beliau banyak dikaji dari kalangan orang muslim atau non muslim. Beliau lebih merupakan pengkaji sejarah politik dan masyarakat”
6. “Pemikiran para ulama salaf juga menjadi inspirasi bagi para pemikir kontemporer seperti Muhammad Abid al-Jabiri yang menulis buku Al-aqlu siyasil Arabi (Nalar politik Arab), yang dimaksud dalam bukunya Jabiri tak lain adalah motif-motif (muhaddidat) tindakan

politik (cara menjalankan kekuasaan dalam sebuah masyarakat), serta manifestasi (tajalliyat) teoritis dan praksisnya yang bersifat sosiologi”

7. “Dalam hal ini Ahmad Mu`am menyimpulkan falsafah politik, domain yang menjadi prioritas lebih fokus pada masalah produk hukum dengan tujuan kebijakan yang akan dikeluarkan bisa memberikan signal positif bagi masyarakat. Dan Islam merespon produk hukum yang menjadi prioritas tersebut dengan merefrensi sumber yang disepakati mayoritas umat Islam untuk menjadikan pondasi supaya Islam sesuai dengan tempat dan zaman”. (Salim, 2002)

E. Dasar-dasar Hukum Politik Dalam Islam

Agama Islam telah mengatur masalah politik yang bersumber dari Alquran dan Hadis, oleh karena itu bagi umat Islam ruang untuk memproduksi hukum harus tetap berpegangan dengan dasar-dasar fundamental seperti musyawarah, keadilan, dan sifat egaliter. Dan masalah dasar-dasar tersebut tidak ada kesepakatan diantara para ulama syariah tetapi perbedaan hanya masalah apakah dasar-dasar itu ada korelasi dengan produk hukum yang akan dikeluarkan”.(Faruqi, 1986)

“Dalam masalah dasar-dasar fundamental para ulama berbeda pendapat, pertama, sebagian ulama ahli syariah mengatakan yaitu keadilan, musyawarah, dan sifat egaliter, kemudian yang kedua sebagian ulama syariah yang lain yaitu keadilan, musyawarah, dan taat kepada para ulil amri meskipun mereka disenangi atau dibenci kecuali apabila mereka memerintahkan maksiat maka jangan ditaati dan didengarkan”.(Al-Maudui, 1992)

“Dalam buku Hukum Dan Konstitusi Dalam Islam dijelaskan dasar-dasar yang diimplementasikan dalam bernegara untuk memproduksi hukum yang berlaku bagi masyarakat pada masa sekarang masih menemukan relevansinya, sehingga secara implisit dasar-dasar itu telah dipraktekkan oleh banyak negara yang menganut demokra. Diuraikanya beberapa pendapat para ulama ahli syariah yang pertama supaya kita mengetahui referensi yang diambil dari sumber hukum Islam dan mengetahui ruang lingkupnya”.

1. Musyawarah

“Dasar ini menjadi sebuah pegangan bagi umat muslim dalam menjalankan roda pemerintahan karena mayoritas ulama syariah dalam bidang hukum bersepakat bahwa dasar ini sesuatu yang otentik yang berasal dari Alquran dan hadis, dan apabila ditinjau dasar tersebut mempunyai kesamaan disuarakan penganut demokrasi di barat dalam masalah kebebasan untuk mengcounter ideologi otoritarian”.(Al-Maudui, 1992) “Dan di dalam Alquran ada dua ayat yang secara jelas menerangkan masalah musyawarah berbunyi *Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*

Kemudian Alquran 42:38 yang berbunyi: *Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka.* Dua ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi bagi umat Islam untuk selalu bermusyawarah dalam permasalahan secara umum atau masalah politik dengan ruang lingkup negara” .(Al-Maudui, 1992)

2. Keadilan

“Masalah keadilan mempunyai keterikatan yang erat dengan musyawarah, kalau boleh kita sebut bahwa dalam bermusyawarah harus ada unsur keadilan dalam menetapkan undang-undang atau menyelesaikan masalah di masyarakat. Dalam pandangan Islam keadilan sesuatu yang mendasar untuk berintraksi dengan masyarakat karena cenderung ada perbedaan antara mereka supaya tidak ada diskriminasi atau orang kelas dua” .

Di dalam Alquran Allah banyak menjelaskan masalah keadilan untuk menjadikan manusia yang beradab dengan redaksi *al-adly* yang mempunyai sinonim dengan *al-qisth*, seperti Alquran 49:9 *“Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”* .

Dan dasar ini harus menjadi pegangan bagi pemegang kekuasaan baik presiden, hakim, wakil rakyat dll untuk menemukan solusi bagi masyarakat, jika kita menelisik ayat-ayat dalam Alquran yang menerangkan tentang keadilan, telah diturunkan oleh Allah baik di Makkah atau di Madinah, dari indikasi ini menunjukkan begitu pentingnya berlaku adil dalam menjalankan roda kehidupan ini dimanapun kita berada.

3. Egalitarian

“Dasar ini bisa disebut juga bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama dan tidak ada diskriminasi, oleh karena itu Islam menetapkan musyawarah bermanifestasi bahwa manusia itu mempunyai hak yang sama, dan menghilangkan idiom hegemoni bagi golongan tertentu Islam mengenal masalah kesamaan diantara manusia selama 14 abad, dasar ini tidak diketemukan pada undang-undang yang dibuat oleh manusia kecuali setelah revolusi Prancis, kemudian dijadikan undang-undang di Inggris pada abad 17 M, setelah itu Amerika juga menetapkan undang-undang kesamaan pertengahan abad 18 M” .(Salim, 2002)

“Dan argumentasi yang menguatkan bahwa Islam sudah mengenal masalah kesamaan di antara manusia seperti dalam Alquran 4:165 berbunyi: *“(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alas dan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusny rasul-rasul itu. Dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”*. “Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi bagi umat Islam meskipun mereka berbeda dalam jenis kulit, keturunan, kedudukan, supaya mereka melakukan apa telah diperintah atau dilarang oleh Allah”.

F. Sejarah Perkembangasn Politik dalam Islam

1. Masa Klasik

a. Masa Nabi

Politik Islam masa Nabi merupakan periode formatif dalam skala peletakan dasar-dasar ideal Islam. Sebagai respons terhadap kondisi sosial yang dihadapinya, Nabi menetapkan program reformasi sosial untuk membentuk ummah, Program yang terbukti berhasil gemilang di antaranya adalah:

1) “Mengontrol dinamika sosial ke arah konstruktif, dalam bentuk mengasosiasi aneka suku bangsa, bahkan aneka agama. Ini dimodali oleh spirit Islam yang memfasilitasi perekat motivatif dan ideologis untuk mempersatukan seluruh bangsa. Fakta-faktanya adalah adanya : peristiwa pengembalian , pengorganisasian kelompok kelompok sosial; Muhajirun dan Ansor, bahkan adanya bintang tamu Yahudi dan Nasrani”

2) “Mewujudkan kohesi sosial melalui pernikahannya dengan banyak iste.ri. Ini juga dimaksudkan sebagai strategi politik dengan pendekatan kultural. Pada sisi lain, pernikahannya terhadap istri pertamanya Khadijah, yang dipadu dengan reputasi predikat *al-amin* nya menjadi strategi politik berpendekatan ekonomis”.

3) “Pencanangan Piagam Madinah sebagai konstitusi negara Islam (konstitusi tertulis sekaligus *world order* multireligious pertama dalam sejarah manusia), merupakan jaminan konstituen bagi semua warga *ummah*. Pada realitasnya, *ummah* merupakan masyarakat plural, yang mana warganya tidak saja secara khusus (eksklusif) terdiri dari umat Islam saja, akan tetapi Mereka juga berada dalam satu atap di atas konstruksi prinsip baru yang toleran dan integratif, untuk mempertahankan sistem sosialnya”(Faruqi, 1986).

“Dalam toleransi tersebut tidak saja diwujudkan dengan tumbuhnya saling beradaptasi sebagaimana diungkapkan oleh Parsons, untuk mencapai keseimbangan sosial, akan tetapi juga integrasi ekonomis yang dibuktikan melalui penerimaan resesionalis *Ansar* terhadap pemigran Makkah (*Muhajirun*) yang datang dengan, tangan kosong”.(Esposito, 1984) “Ketika itu juga dapat dilihat suburnya *collective orientation*. Ini terbukti dengan dicanangkannya -Piagam- Madinah setelah direkosnya kesepakatan warga. “Piagam tersebut merupakan pernyataan untuk mempertahankan identitas sistem sosial terhadap kemungkinan penetrasi luar maupun ketegangan internal, sebagai salah satu jaminan untuk menciptakan ekuilibrium sosial. Sebagai periode formatif, *shari’ah* dalam konteks historis ketika itu, sebagai nilai acuan mengalami tahap penerjemahan dalam berbagai bentuk dan substansinya, oleh Nabi sebagai penerjemah ideal Islam selama hayatnya. Sedangkan pada periode berikutnya *shari’ah* diacui dengan interpretasi dan reinterpretasi”.

b. Masa *Khulafa' Rasyidd*

“Masa ini berkonsentrasi pada usaha mempertahankan ekuilibrium sosial yang telah dibentuk Nabi. Sebab setelah Nabi wafat, *ummah* segera berhadapan dengan permasalahan guncangan identitas, disintegrai warga dan munculnya *self orientation*, berupa isu suksesi dan problem fragmentasi politik - *civil war*-. Di sisi lain, keberlakuan Piagam Madinah dinyatakan habis secara otomatis dengan wafatnya Nabi, oleh pihak-pihak luar negeri yang terkait dengan piagam tersebut. Ciri khusus masa ini adalah dijunjung tingginya demokrasi dalam pemerolehan kekuasaan oleh khalifah, yang membedakannya dari periode-periode setelahnya”.(Yatim, 1996)

“Pertama, Abu Bakr memilih cara perang untuk menyikapi warga yang tidak konsisten terhadap identitas dan *collective orientation*, yang terkenal dengan istilah perang melawan kemurtadan”.

“Kedua, pada masa Umar, konsentrasi berperang Abu Bakr dialihkan pada pemenuhan sarana-sarana sistem sosial seperti menciptakan tahun hijriah, peorganisasian administrasi, pendirian pengadilan, jawatan kepolisian dan jawatan pekerjaan umum, dan pendirian lembaga ekonomi -*Bayt al-Mal*-. Meskipun tidak sekuat masa Nabi, pulihnya keseimbangan sosial terbukti dengan kesempatan Umar untuk melakukan ekspansi wilayah kekuasaan. Bersamaan dengan program ekspansi tersebut, Umar memperkenalkan gelar *Amir al-Mu'minin*”.

“Ketiga, Usthman melanjutkan misi perluasan wilayah Umar. Di sisi lain ekuilibrium sosial tergoncang kembali oleh ancaman sikap disadaptif terhadap kepentingan warga, kepemimpinan Usthman sendiri dengan melakukan nepotisme dalam jabatan dan menumpuk kekayaan dan uang negara” . (Yatim, 1996)

c. Masa Dinasti Umayyah

Konsentrasi awal masa ini dalam pandangan Ahmad Amin “adalah menyasati *shari'ah*, melalui penguatan diri sendiri khalifah (Umayyah) sebagai kekuasaan Tuhan. Ini disebabkan oleh pemerolehan kekuasaan melalui cara non-demokrasi, yaitu tipu ---muslihat ---rekayasa-. Masa inilah yang pertama kali memperkenalkan -korupsi moral- politik Islam dalam skala demokrasi. Konsentrasi utamanya adalah memperluas wilayah teritorial sistem sosial, dengan andalan utama-kekuatan fisik - militer- yang mendampingi instrumen kekerasan, diplomasi dan rekayasa. Ini berarti bahwa sarana-sarana sosial diabaikan, kecuali perhatian yang tidak besar terhadap pemenuhan sarana intelektual. Itupun dikooptasi oleh program arabisasi bermuatan format eksklusif-etnis, kecuali masa Khalifah Umar bin Abd al-Aziz (717-720) untuk seluruh wilayah kekuasaan, yang diberlakukan pada bahasa administrasi, aktualisasi sastra dan standar mata uang”.(Nasution, 1985) “Di pihak lain orientasi politiknya adalah kepentingan elit (bermewahan). Karena format dan orientasi politik tersebut, peluang suburnya kelompokkelompok oposan (kaum *Mawali*/non-etnik Arab, keturunan Nabi, dan rival

ideologi) terbuka lebar. Sehingga keperkasaan militernya untuk meredam kemelut internal, akhirnya takluk pada integrasi antar kelompok-kelompok oposan, menandai berakhirnya kekuasaan” (Amin, 1972)

d. Masa Dinasti Abbasiyyah

“Sebagaimana Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyyah merasa amat perlu untuk melakukan legitimasi politik dengan menyiasati *shari’ah*, karena alasan yang sama (non demokrasi) seperti Dinasti pendahulunya, akan tetapi melalui kudeta dengan dukungan kaum *Mawali*. Bahkan, pengukuhan diri sebagai khalifah Tuhan itu dinyatakan oleh Khalifah al-Mansur (754-775) sutradara Khalifah pertama al-Abbas al-Saffah (sang penjagal), menggunakan kalimat aksentuatif *-innama ana Sultan Allah fi Ardih-* Sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di bumiNya”. (Yatim, 1996). Konsentrasi ekspansi Dinasti Umayyah dialihkan oleh Dinasti Abbasiyyah ke pengembangan kebudayaan untuk mengisi sarana sistem bagi luasnya wadah teritorial yang diwariskan oleh Dinasti Umayyah. Sehingga Dinasti Abbasiyyah berjasa besar mengantarkan Islam mencapai kepuasan sejarahnya dengan predikat *The Golden Age of Islam*.

“Pemenuhan sarana sistem sosial dimantapkan dan dikembangkan: (1) dalam sistem pemerintahan, Dinasti Abbasiyyah menciptakan tradisi baru “mengangkat wazir (setingkat perdana menteri), (2) membentuk pasukan khusus yang dibekali kemampuan strategis, lebih daripada penampilan fisik, dan (3) peningkatan kualitas peran lembaga-lembaga negara. Sedangkan format politiknya adalah inklusif”. Hal ini dibuktikan dengan :1. “Menghapus *arabisasi* melalui pemindahan ibukota dari Damaskus – Syria- ke Baghdad (Irak) dan pelibatan terhadap *Mawali* bahkan non muslim dalam peran-peran fungsional kenegaraan. 2, proyek transformasi informasi dan akulturasi kebudayaan asing melalui gerakan penerjemahan karya-karya Yunani, Persia dan India.

Sedangkan orientasi politiknya diarahkan pada kesejahteraan rakyat baik dalam bentuk fasilitas dan pelayanan umum-sosial maupun pemberdayaan intelektual. Melalui dan akibat format dan orientasi politik tersebut, ekuilibrium sosial terbukti kok, bahkan dinamis. Indikasinya adalah: 1. “suburnya dinasti-dinasti kecil yang memisahkan diri tetap menghormati pemerintahan pusat, bahkan turut memberikan dukungan dalam perkembangan kebudayaan. 2. kekuasaan bertahan lama, mencapai lebih dari lima abad, 3 kejatuhan kekuasaan bukan karena faktor internal oposan, akan tetapi disebabkan penetrasi pihak luar (Mughal, tahun 1258), dan pencapaian puncak kemajuan peradaban dalam ilmu-ilmu pengetahuan”. (Yatim, 1996)

2. Masa Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan, sistem sosial Islam terbagi dalam beberapa sistem sosial melalui keberadaan tiga kerajaan besar, yaitu “Sunni Ottoman (Asia Barat dan Eropa Timur), Shi’i Shavawi

(Persia), dan Sunni Mughal (India). Ketiganya disebut *gunpowder empires* (kerajaan-kerajaan obat peledak). "Karakter politik abad pertengahan adalah; *pertama*, sebagaimana masa Dinasti Umayyah, sibuk dengan perluasan wilayah. *Kedua*, terjadi pergeseran orientasi nilai yang dianut, yaitu lebih besar ke tasawuf. Ini mengakibatkan sistem sosial mandul SDM-nya secara politis. Dominasi orientasi eskatik itu mengabaikan kebutuhan ekonomi yang menjadi unsur sistem sosial".(Taneko, 1994) "Sementara pada taraf individual, para individu dengan sikap taklidnya mengabaikan kemampuan menampakkan diri untuk belajar, yang dalam bahasa Smith diartikan kehilangan nafsu sosial sekunder".(Campbell, 1994) Di sisi lain, peran ulama sebagai penjamin/ penjaga keadilan dalam bentuk servis sosial, berorientasi ke elit kekuasaan sebagai advisor dan bahkan administrator, tidak sebagaimana pada abad klasik. Oleh karenanya, melalui disintegrasi pada masing-masing sistem sosial, "pengebirian" kebutuhan ekonomi, kehilangan nafsu sosial 'sekunder' dan disfungsi penjamin keadilan, wajar apabila sistem sosial abad pertengahan lemah. Sehingga Islam kalah secara strategis dalam bidang politik dan ekonomi".

3. Masa Abad Modern

Kondisi perpolitikan pada abad "Pertama, pada masa pra-modern ini, politik Islam ditekankan pada purifikasi praktik-praktik keagamaan. Masa ini merespon abad pertengahan. Wahhabi menggunakan cara *holy war* dengan target membinasakan, Shah Wali Allah menekankan reformasi tasawuf daripada membinasakannya, dan Sufi Afrika memilih cara meredefinisi tasawuf dalam kemasan: bahwa salat dan aksi politik bersatu untuk mewujudkan kehendak Tuhan di bumi. Respons tersebut disebabkan oleh karena pramodern melihat abad pertengahan sebagai abad pergeseran sistem sosial dari nilai-nilai yang semula telah disepakati sebelumnya".

Kedua, "nasionalisme merupakan gerakan penyadaran untuk memperkokoh sistem sosial dari kerapuhannya akibat tekanan dari pihak di luar sistem kolonial. Dalam hal ini, nilai-nilai agama yang secara moral memiliki kekuatan pembebas atau penyelamat, dipakai sebagai acuan utama".(Taneko, 1994)

Ketiga, "negara-negara modern memberikan perhatian kepada politik dan potensi sosial. Bentuk-bentuk politik yang diambil adalah; (1) sekuler oleh Turki; (2) Islam, oleh Saudi Arabia dan Pakistan; dan (3) Muslim, oleh sebagian besar wilayah. Selain itu adalah ada dua kelompok alternatif di *Ikhwan al-Muslimin* (Mesir) dan *Jama'at Islamiyyah* (Pakistan) yang didalamnya berfungsi sebagai katalisator".(Yatim, 1996)

G. Relasi Agama dan politik

"Tahun 2014 adalah tahun politik bagi bangsa Indonesia boleh dikatakan bahwa jargon menjadi pemimpin seakan dambaan setiap orang. Puluhan partai politik dideklarasikan ratusan janji terucap.

Beragam trik politik dipertontonkan. Semuanya mengklaim; sayalah yang paling layak menjadi orang nomor satu demikianlah kenyataannya setiap kita menyaksikannya di berbagai media masa baik cetak juga elektronik. Tanpa terasa hampir setiap kita hanyut dalam obrolan politik. Semuanya memberikan komentar dan kritik dan pujian, serta prediksi siapa pun yang akan menjadi pemenang. Pakar politik merinci secara detail seluk-beluk dunia politik, dan memprediksi berbagai peristiwa yang akan terjadi di taanah air. Nampaknya saat ini, benar-benar dunia politik membangkitkan kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia sulit ditolak politik memegang komando jalannya bangsa ini di tengah arus caturan berbagai fenomena dan kebrobrokan anak bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan, terutama rendahnya akhlak pemimpin yang dipertontonkan di hadapan rakyatnya".(Maarif, 1997)

Mengapa hal tersebut menjadi fenomena perpolitikan bangsa ini. Apakah agama yang mereka anut tidak lagi mempengaruhi jalannya pikiran politik, atau agama dipolitisasi untuk kepentingan sesaat, sehingga nilai-nilai agama dipinggirkan bagaimana bisa agama dan politik bersatu sebab seringkali orang mengartikan yang namanya agama itu hanyalah semata-mata suatu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan Yang Maha Kuasa saja. Definisi ini mungkin tepat bagi bermacam-macam agama. Agama berperan mengoreksi politik yang menyimpang dari tujuan yang mulia menyejahterakan rakyat dan politik meskipun telah membangkitkan kesadaran agama untuk tidak terbuai dalam permainan politik lalu melupakan fungsi kritis agama dan sikap membisu agama terhadap aktivitas politik.

Agama merupakan hal yang sangat menarik untuk diperdebatkan. Bahkan suatu hal tanpa membawa-bawa agama terkesan biasa saja, namun setelah membawa agama maka akan menarik berbagai orang untuk memperdebatkannya. Demikian juga dalma bidang. Betapa politik yang melibatkan agama sangat ramai pro-kontra nya dibandingkan politik yang tidak melibatkan agama.(Maarif, 1998)

Semestinya agama menarik garis pisah yang jelas dari politik agar tidak terkooptasi dan disubordinasi. karena ketika dikooptasi politik negara, agama hanya akan menjadi alat di tangan penguasa negara untuk mendapatkan legitimasi. Agamapun akan membisu ketika ketidakadilan dan ketidakbenaran merajalela. Namun disisi lain agama sebagai institusi dalam masyarakat harus pula mengoreksi politik agar hakikat sejati tetap terpelihara. Garis itu bengkok saling tindih atau apapun hasilnya, amat tergantung pada kecermatan kita untuk selalu mencari format baru dan tepat dalam membangun hubungan agama dan politik.

Sedangkan politik atau politikus yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Menurut Aristoteles, politik adalah yang dibutuhkan warga negara untuk mewujudkan kesenangan bersama. dengan demikian politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan, dalam masyarakat yang melibatkan proses pembentukan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan negara

dan pemerintah. Politik juga diartikan sebagai seni dan ilmu untuk memperoleh kekuasaan konstitusional dan nonkonstitusional berarti politik yang didukung oleh kekuasaan dan kekuasaan harus menjadi pemimpin dan kepemimpinan. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Mawardi “Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa setiap orang dari umat Islam wajib mengangkat pemimpin untuk meneruskan perjuangan Rasulullah saw dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia.”

Akhir-akhir ini negara Islam di seluruh dunia sedang mengalami nestapa. Setelah runtuhnya Uni Soviet, negara-negara Islam, termasuk Indonesia banyak yang menghadapi tantangan politis, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Richard Nixon misalnya menyatakan:

“Berinteraksi dengan dunia Islam ibarat berada dalam jurang sempit yang dipenuhi ular-ular beracun”. Francis Fukuyama dalam bukunya *‘The End of History’* mengatakan *“Orang-orang fundamentalis Islam lebih dari sekedar kaum Fanatisme Eropa”*. Masih banyak lagi pernyataan-pernyataan senada, yang sengaja dilontarkan untuk merusak citra Islam dimata dunia. Ditambah lagi dengan realitas bahwa sebagian besar pemimpin Islam menunjukkan perilaku amoral dan akhlaknya rendah, sehingga kekuatan dan kehebatan Islam itu tertutup oleh buruknya akhlak pemimpin. Dalam komunitas Islam misalnya, masih saja terdapat berbagai bentuk dan corak yang berbeda-beda. Sehingga menganggap bahwa memasuki dunia politik aib harus disingkirkan. Banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam kesalahan dan banyak diantara mereka yang melenceng jauh dari tujuan. Karena mereka mengira bahwa politik adalah perbuatan setan yang sama sekaliali tidak pantas bagi umat Islam. Sebagai contoh atas pelaksanaan Pemilu mereka memberikan suaranya kepada penguasa yang jahat, akhlaknya rendah dengan tujuan untuk mendapat Pulus (uang atau duit) demokrasi digadaikan, amanah diperjualbelikan dan nepotisme disuburkan.

Memahami realitas diatas, Nurcholish Madjid mengemukakan keunikan Islam di antara agama-agama lain. dalam Islam perbandingan yang lebih luas dengan agama-agama lain, sesungguhnya keunikan Islam bukanlah adanya keterkaitan yang sangat erat antara agama dan politik itu sendiri. Agama-agama lain, juga mengenal pemisahan dengan masalah politik. Keunikan Islam dibanding dengan agama-agama lain berada dalam pandangannya tentang politik yang menurut ukuran kemanusiaan sangat maju, sebagaimana yang dikemukakan Robert N Bellah, seorang sarjana sosiologi agama terkemuka, bahwa praktek politik Islam itu berlandaskan pada:

1. Kedudukan pemimpin kenegaraan yang terbuka terhadap penilain berdasarkan kemampuan atau prestasi.
2. Pemimpin ditetapkan melalui proses pemilihan terbuka, dan sesuai keadaan.

3. Semua warga masyarakat dan Negara, yang disebut ummat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, berdasarkan pandangan persamaan manusia di depan Allah dan Hukum-Nya.
4. Hak-hak tertentu yang luas dan adil juga diakui ada pada golongan agama-agama lain, sebagaimana tercantum dalam Piagam Madinah. (Taneko, 1994)

Pada bagian akhir tulisan ini, kita ajak kesadaran nurani yang paling dalam dari para pemimpin dan penguasa negeri ini untuk mencontoh 'Politik kerasulan' yang telah terbukti membawa keberhasilan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini tidak saja diakui oleh kalangan sejarawan muslim, namun juga diakui oleh para sejarawan non muslim, salah satunya adalah Michael H. Hart mengatakan Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses luar biasa sebagai pemimpin dunia.


Paling tidak ada lima rahasia keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad. **Pertama**, sejak kecil sudah ditempa untuk siap menderita, **Kedua**, beliau memimpin dengan keteladanan dan akhlak, tidak saja dengan akhlakul karimah, tapi juga dengan akhlakul 'azimah, yaitu dengan perilaku mulia dan keyakinan yang penuh dengan nilai-nilai agama. **Ketiga** adalah satu nya kata dengan perbuatan, alias jujur. Sikap siddiq yang ditampilkan beliau berhasil merubah perilaku umat. **Keempat**, adalah punya sandaran vertical yang kuat. Walaupun Nabi Saw adalah orang yang maksum tanpa dosa dan jaminan Allah Swt masuk surga, namun ia tetap beribadah semaksimalnya. **Kelima**, adalah punya sahabat yang solid, tangguh dan setia. Artinya membangun teamwork yang dilandasi oleh keimanan dan loyalitas yang tinggi dalam melakukan berbagai perubahan. (Sobari, 1996)

Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar seperti dua orang bersaudara yang dilahirkan dari suatu perut yang sama. Oleh karena itu wajib bagi seseorang penguasa untuk menyempurnakan agamanya dan menjauhkan hawa nafsu, bid'ah, kemungkarannya, keragu-raguan dan setiap hal yang mengurangi kesempurnaan syariat. Sesungguhnya tabi'at rakyat merupakan tabi'at dari penguasa. Orang-orang awam melakukan perbuatan yang merusak karena mengikuti pembesar, mereka meneladani dan mencontoh tabi'at dari para penguasa. Orang-orang awam melakukan perbuatan yang merusak karena mengikuti para pembesar, msereka meneladani dan mencontoh tabiat para keturunan Bani Umayyah memiliki kegemaran terhadap bangunan dan pertanian, maka dengan serta merta rakyat dan bangsanya turut meneladani, tetapi ketika Sulaiman bin Abdul Malik kegemarannya makam, jalan-jalan dan memperturutkan syahwat maka seluruh rakyatnya meneladani dan mengikutinya.

Pada bagian akhir tulisan ini, yang ini penulis katakan adalah Apabila pergerakan Islam mampu memanfaatkan kesempatan pesta demokrasi ini dengan baik, terkordinir dengan rapi, dan mampu bermain cantik, menjadikan Islam sebagai satu kesatuan masyarakat yang hakiki, maka pemilu yang

sedang dan akan berjalan menjadi milik umat Islam. Pada gilirannya Islam bisa menjalankan undang-undang, sistem dan tugas sebagai wakil rakyat (legeslasi) dengan cara-cara yang terhormat. Kita juga harus yakin bahwa masa sekarang sudah melebihi batas ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada orang yang memahami zamannya dan menjalankan politiknya dengan lurus, demokrasi dan aplikasinya.

Perbedaan pasti akan terjadi, karena hal itu merupakan sunnatullah sekaligus rahmat bagi kekuatan kekhalifahan manusia di muka bumi, Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbedaan itu adalah tabiat manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman:

 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

Artinya: "Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat." (Q.S. HUD: 118)

Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan 'Politik Kerasulan' dan menteladani perilaku, perbuatan dan perjuangannya, sehingga kebenaran universal Islam itu dapat dikordinir dengan baik untuk mengalahkan segudang kebhatilan, dan yakinlah kebhatilan itu akan lenyap. Negeri inipun akan mampu bangkit dari berbagai keterpurukan, kemerosotan akhlak, dan keterbelakangan. Dari karesteristik di atas, mungkin bisa menjawab siapa calon pemimpin berkualitas dan berintegritas yang layak kita pilih, apakah ada calon pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut? Apa mau dikata carilah yang mendekati kriteria itu. (Bakhir, 1993)

Untuk itu sudah mendesak membuat kebijakan yang berpihak pada reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan religiusitas sebagai rujukan moral bangsa, dan arah pembangunan nasional, agar masyarakat hidup nyaman, rukun, sejahtera dan bermartabat, antar lain:

Pertama, perlu Peningkatkan pemahaman persaudaraan sebangsa dan setanah air (ukhuwah wathoniyah) dan perluasan koridor ukhuwah sebagai Networking umat, disamping melakukan revitalisasi agama di sektor-sektor strategis melalui peran lembaga-lembaga keagamaan . sekaligus adanya ketegasan dalam penegakkan hukum yang berkeadilan kepada siapa pun di negara bagian Pancasila ini.

Kedua, memperkuat peran pemangku moral dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta pemuda dalam mensosialisasikan nilai-nilai humanis agama. Agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim. Agama perlu dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi obyektif masyarakat Sumatera Utara yang majemuk (Multi-Kultural, Multi agama dan Multi-etnis). Pemahaman keagamaan semestinya bersifat moderat, dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama. Pemahaman semacam ini akan menghasilkan ajaran agama yang mengedapankan kasih sayang

(rahmah), perdamaian (salam), toleransi (tasamuh), dan moralitas dalam hubungan antar-manusia, baik secara vertikal maupun horizontal.

Ketiga, untuk penguatan karakter dan penegakan moral bangsa, perlu kesadaran berasama kebutuhan kesadaran bersama dan sinergisitas pemerintahan dengan pilar kerukunan (tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda) untuk merevitalisasi nilai-nilai moral penegak hukum dan karakter bangsa. Paling tidak ada minimal 5 indikator karakter bangsa, yaitu (1) watak berketuhanan yakni kesadaran bahwa ia adalah Makhluk Tuhan. (2) Watak kebangsaan yakni kesadaran bahwa dirinya adalah anak Indonesia. (3) Watak Kenersamaan yakni kesadaran tentang pentingnya persatuan dan keberadaan orang lain di sampingnya sehingga ia menjadi insan multikultural dan akomodatif terhadap kebenaran. (4) Watak keadaban yakni kesadaran bahwa semua manusia beradab. (5) Watak kejuangan yaitu kesadaran bahwa semua yang diinginkan harus diperjuangkan, memiliki kepeloporan dan patriotisme.

Keempat, penguatan karakter dan moral nasional bangsa adalah menjadi sebuah keniscayaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun kerja atau profesi, melalui “Gerakan penguatan ahlak dan karakter bangsa” yang disertai dengan sikap teladan para aktor moral dan para pemimpin bangsa. Gerakan itu perlu juga diarahkan ke dalam bidang-bidang aktivitas warga yang lebih spesifik, sehingga akan muncul penguatan “Moral birokrasi” “Moral Politik”. “Moral Bisnis”, “Moral penegakan hukum” dan sebagainya. semoga Negeri ini selamat dari kehancuran.¹⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan kewajiban umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014 dengan buku yang berjudul “(Himpunan fatwa MUI 1975)” dengan bab keputusan ijtima’ ulama yang diterbitkan oleh Airlangga diterbitkan dalam fatwa tersebut di atas pada halaman 867 dengan bab keputusan Ijtima ulama komisi fatwa se-indonesia ke-3 tahun 2009 isinya adalah 1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam yang ditujukan untuk memilih yang diminta atau yang diperlukan cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan. 2. memilih pemimpin dalam Islam adalah keharusan untuk menegakkan Imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. 3. Imamah dan imarah dalam Islam membutuhkan persyaratan sesuai dengan ketentuan agar terumbu kemaslahatan di masyarakat. 4. memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa jujur atau Siddiq terpercaya atau amanah aktif dan aspiratif tabligh memiliki kemampuan Fathonah dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumannya adalah haram.(Husein, 1981)

H. Kondisi Politik di Indonesia Sekarang Ini

1. Kondisi Perpolitikan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Survei Publik LIPI tahun 2018 di Jakarta dan Makasar menjelaskan tentang kondisi perpolitikan di Indonesia berdasarkan unsur akademisi, peneliti, kementerian/lembaga terkait, media, hingga unsur masyarakat sipil yang dilakukan selama bulan april hingga juli 2018 memaparkan temuan sebagai berikut: Ada empat aspek yang dilihat dalam survei ini, pemetaan kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Terkait aspek kondisi politik, ada tiga temuan penting yang perlu digarisbawahi dari hasil survei ini. **Pertama**, kebebasan sipil berada dalam kondisi baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya akses bagi masyarakat terkait kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan berkeyakinan/beribadah, dan kebebasan dari diskriminasi. **Kedua**, di antara beberapa lembaga demokrasi, partai politik (parpol), kepolisian, dan DPR dinilai sebagai lembaga demokrasi dengan kinerja buruk. Sedangkan KPK, TNI, dan Presiden dinilai sebagai lembaga demokrasi dengan kinerja terbaik. **Ketiga**, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, partisipasi pemilih dan kinerja penyelenggara pemilu serta tata kelola penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang paling menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebaliknya, ketidakteraturan Daftar Pemilih Tetap (DPT), minimnya edukasi kepada pemilih, tingginya beban kerja penyelenggara pemilu, minimnya pemahaman dan sosialisasi tentang sistem Pemilu Serentak, politik uang, serta politisasi identitas disinyalir dapat berpotensi menimbulkan kerawanan dan menjadi tantangan bagi penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal ini tentu memerlukan perhatian dan penanganan serius demi tercapainya Pemilu Serentak 2019 yang demokratis.

Pada aspek kedua terkait kondisi ekonomi, diketahui bahwa sekalipun tingkat kesejahteraan masyarakat sudah relatif baik, namun tingkat kesenjangan ekonomi di masyarakat masih perlu diperhatikan dan dicarikan solusi terbaik. Hal ini dikarenakan faktor ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi ternyata masih menjadi faktor yang cukup dominan berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi Indonesia dan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Selain dua faktor di atas, hal lain yang juga dinilai cukup dominan berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak adalah krisis ekonomi dan inflasi. Oleh karena itu, untuk menciptakan konsolidasi demokrasi Indonesia dan menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2019, negara perlu melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, antara lain dengan melakukan pengembangan industri dalam negeri, menjaga stabilitas harga, dan mengatur distribusi logistik.

Sementara itu, pada aspek ketiga yang berkaitan dengan aspek sosial budaya, Survei Ahli ini berhasil memotret keadaan yang menunjukkan masih terdapatnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat Indonesia. Kesenjangan ini terjadi sebagian besar karena adanya perbedaan tingkat dan akses di bidang ekonomi. Selain masih terdapat kesenjangan sosial, sikap intoleransi di Indonesia dalam

kurun waktu lima tahun terakhir juga dinilai cukup tinggi. Tiga faktor utama yang menyebabkan kondisi intoleransi tersebut, yaitu tingginya angka politisasi atau manipulasi isu-isu identitas, stigmatisasi dan diskriminasi, kekerasan, serta persekusi kepada kelompok yang dianggap berbeda. Kondisi-kondisi demikian, khususnya politisasi identitas dan SARA (suku, agama, dan ras) juga disinyalir dapat menjadi hal yang berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan upaya mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Aspek keempat, yaitu kondisi pertahanan dan keamanan, terdapat beberapa temuan penting yang dapat digaris bawahi dan dapat dirujuk sebagai bahan evaluasi bagi sistem pertahanan keamanan ke depan. Pertama, survei ahli menyimpulkan bahwa sekalipun sistem pertahanan dianggap sudah efektif, peningkatan kualitas personel masih perlu untuk diprioritaskan sebagai upaya memutakhirkan sistem pertahanan nasional. Selain itu, masalah seperti kejahatan trans-nasional, korupsi, dan kriminalitas merupakan permasalahan hukum dan keamanan yang paling mendesak untuk ditanggulangi secara efektif dan efisien. Sementara itu berkaitan dengan peran militer, hasil survei menyimpulkan bahwa militer sebaiknya tidak perlu diberikan peran politik dan ekonomi. Kesimpulan ini sejalan dengan beberapa pendapat ahli yang menilai bahwa di negara-negara demokrasi, peran militer sebaiknya bebas dari nilai-nilai politik. Terakhir, terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak dan konsolidasi demokrasi Indonesia, hasil survei ini menyimpulkan bahwa konflik sosial dan politisasi aktor keamanan menjadi dua hal yang paling berpotensi mengganggu hajatan besar demokrasi Indonesia tersebut.

Selain itu, Prof. Syarif juga menggarisbawahi tentang kinerja partai politik yang masih buruk. Menurutnya, kinerja partai politik yang demikian terjadi karena partai politik gagal menjalankan fungsi partai politik yang seharusnya melekat kepadanya, baik itu fungsi rekrutmen politik yang di dalamnya terdapat mekanisme kaderisasi partai, komunikasi politik, sosialisasi dan pendidikan politik, serta pengatur konflik. Temuan kinerja parpol yang demikian sekaligus mengonfirmasi bahwa demokrasi di Indonesia masih sebatas pada demokrasi simbolik atau demokrasi prosedural yang menghadirkan lembaga demokrasi secara fisik, namun masih lemah secara fungsi. Problematika partai politik yang demikian ditengarai disebabkan oleh belum adanya demokrasi internal partai yang ditandai dengan sentralisasi partai dan oligarki dalam partai.

Sejalan dengan pemikiran Prof. Dr Syarif Hidayat, kedua pembahas selanjutnya, Dr. Firman Noor, MA dan Prof. Syamsuddin Haris, juga menyatakan bahwa permasalahan dalam tubuh partai politik di Indonesia saat ini memerlukan perhatian khusus untuk segera ditangani agar dapat menciptakan konsolidasi demokrasi Indonesia. Dr. Firman Noor secara khusus juga menambahkan bahwa tantangan demokrasi Indonesia ke depan setidaknya mencakup tiga hal, yaitu diskriminasi, oligarki, dan adanya kekerasan terhadap seseorang untuk menjalankan hak politiknya.

Sementara itu, Prof. Syamsuddin Haris dalam pemaparannya lebih menekankan pada kebutuhan mendesak untuk segera melakukan reformasi partai politik di Indonesia. Hal ini menjadi wajar untuk segera dilakukan karena dalam sebuah negara demokrasi representatif seperti Indonesia, peran partai politik sangat signifikan sebagai ujung tombak suksesi kepemimpinan di Indonesia. Karenanya, partai politik diharapkan dapat menciptakan kader-kader yang kompeten dan mampu mengemban tugas sebagai pemimpin yang memiliki akuntabilitas.

Lebih jauh, Prof. Haris juga mengkritisi mekanisme keserentakan pemilu yang akan diimplementasikan pada tahun 2019. Menurutnya, model keserentakan Pemilu 2019 dinilai dapat memberatkan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP. LIPI pada dasarnya merekomendasikan Pemilu Serentak bukan dalam bentuk pemilu lima kotak seperti yang akan dilaksanakan Indonesia. LIPI lebih menganjurkan Pemilu Serentak yang mengacu pada locus penyelenggaraan pemilu, yaitu Pemilu Serentak Nasional (untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dan Pemilu Serentak Lokal (memilih Kepala Daerah dan DPRD). Hal terakhir yang ditekankan oleh Prof. Haris adalah perilaku dari elit politik yang memanipulasi isu identitas dan SARA untuk kepentingan elektoral. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Prof. Syarif Hidayat, pendekatan perlu dilakukan dengan elit politik untuk tidak turut serta menciptakan konflik horisontal di tengah masyarakat. Prof. Haris menekankan bahwa elit politik harus mampu menjadi agen pengatur dan peredam konflik, seperti fungsi partai politik yang telah dilekatkan kepadanya.

Dalam sesi tanya jawab, peserta diskusi cukup antusias dengan hasil Survei Ahli dan pembahasan narasumber. Mayoritas peserta tertarik untuk mendiskusikan tentang reformasi partai politik yang menjadi kunci utama dari sistem demokrasi representatif. Dari hasil diskusi tersebut, LIPI merekomendasikan sebuah sistem yang didasarkan pada hasil riset sebelumnya, disebut dengan sistem integritas partai politik yang memiliki lima aspek utama, yaitu standar etik parpol, demokrasi internal parpol, kaderisasi parpol, sistem rekrutmen, dan sistem tata kelola keuangan parpol yang baik. Sistem tersebut dinilai perlu untuk diterapkan di dalam partai karena, menurut hemat penulis, dalam sebuah negara demokrasi semakin berkualitas dan demokratis sebuah partai, maka hal ini dapat mendorong demokratisasi di suatu negara. Selain itu, hal yang tidak kalah penting lainnya, partai juga diharapkan dapat menunjukkan identitas yang jelas melalui ideologi yang ditawarkan. Dengan demikian, partai bukan hanya dapat membedakan dirinya dengan partai lain, melainkan dapat dengan jelas pula menentukan segmen mana yang akan menjadi konstituennya. (Mouliza K.D Sweinstani).

2. Kepercayaan Rakyat Terhadap Trias Politika

Kondisi politik di Indonesia terus mengalami perkembangan. Penegakan demokrasi di Indonesia mendapat perbaikan meskipun dalam perjalanannya banyak ditemui kendala. Namun dengan adanya perbaikan tersebut, maka arah perkembangan kondisi politik Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Asalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya bisa di jaga dengan baik. Untuk itu perlu diketahui dan

dikendalikan segala faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi politik Indonesia. Politik di Indonesia sekarang ini seperti sedang mendominasi wacana di media layaknya gula yang sedang dikelilingi semut, seperti itulah media yang memberitakan kondisi politik di Indonesia. Saat ini kondisi politik yang justru saling memperebutkan kekuasaan.

Para Pejabat yang memiliki kekuasaan telah meluapkan masyarakat. Janji-janji yang dulu di buat justru dilupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang diperoleh. Seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan. Kondisi politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Para pejabat masih saja sibuk mengurus jabatannya.

Lagi-lagi mereka melupakan soal Rakyat, kita semua bisa melihat gejala mati rasa penyelenggara negara misalnya dalam soal pembelian mobil mewah untuk para menteri kabinet Indonesia Bersatu II atau juga pembangunan pagar istana presiden yang menelan biaya puluhan miliar Rupiah. Publik juga bisa melihat bagaimana penyikapan kasus Lapindo, terjadinya 'kriminalisasi' terhadap dua pemimpin KPK, penanganan kasus Bank Century yang belum jelas bagaimana akhirnya, serta ketatnya nuansa tebang pilih terhadap penanganan kasus korupsi. Kesemuanya itu adalah contoh-contoh lain yang harus diakui untuk mengiris rasa keadilan.

Berbicara kondisi politik di Indonesia maka tidak akan jauh dari sebuah kekuasaan. Sekarang ini politik justru seringkali digunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Entah dengan apa pun, tidak melihat rambu-rambu yang ada, hal yang terpenting kursi kekuasaan harus di dapat. Namun, kursi kekuasaan itu harus di bayar dengan pengorbanan yang besar juga baik itu pikiran dan material. Akhirnya rakyat yang menjadi korban dari kondisi politik yang ada sekarang. Para birokrat bangsa ini sepertinya masih terlalu sibuk untuk terus berebut kursi kekuasaan. Sekarang ini, para politikus yang ada justru tidak mampu memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya suasana politik yang ada. Para politikus ini nampaknya masih terlalu sibuk. Padahal rakyat Indonesia di luar sana menjadi korban mereka.

Kebijakan itu jelas mencederai rasa keadilan publik karena di saat yang sama kemiskinan masih mengharu biru Indonesia. Penyikapan dari penyelenggara negara terhadap kasus-kasus tersebut tetap saja di nilai jauh dari komitmen untuk menjadikan aspirasi dan kehendak rakyat. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat yang baik. Bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka seperti bom yang terus di pendam. Maka suatu saat akan meletus juga.

Jika kondisi pemerintah terus seperti ini maka tidak mustahil jika rakyat tidak akan percaya dengan politik, ketidakpercayaan para rakyat inilah yang sangat berbahaya bagi kestabilan negara. Akibatnya masyarakat cenderung apatis terhadap kondisi sebuah negara. Rakyat Indonesia belum merasakan kinerja yang baik dari pemerintah Indonesia, malahan membuat mereka memandang buruk terhadap politik itu sendiri. Selain itu, para generasi muda Indonesia haruslah diperkenalkan dengan politik yang sebenarnya, agar mereka dapat menjadi generasi bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Islam adalah agama yang sesuai dengan zaman dan tempat, oleh karena itu agama ini merespon pelbagai permasalahan yang telah mewarnai kehidupan manusia secara umum tidak dikhususkan bagi umat Islam, baik masalah sosial, politik dan ekonomi, dll. Seperti dalam masalah politik Islam telah memberikan dasar-dasar, seperti musyawarah, keadilan dan egalitarian untuk mendesain masyarakat supaya hidup menjadi sejahtera dan beradab, dan semua dasar ini bersumber dari kalam Allah.

Maka bagi umat Islam harus tetap berpegang dengan kalam Allah untuk melakukan interpretasi yang kondisional dan solutif dan merekonstruksi pemikiran para ulama klasik, terkadang Islam dimonopoli oleh kalangan penafsir tekstual dan pemikir yang taqlid maka tidak mampu memberikan solusi yang mencerahkan sehingga berimplikasi sebagian umat Islam merasa apatis dengan agama ini.

Dan sudah waktunya umat Islam harus berani berinteraksi dengan disiplin ilmu moderen seperti ilmu sosial, ilmu antropologi dan ilmu psikologi untuk mengelaborasi dengan teks-teks agama untuk merespon berbagai permasalahan, karena secara implisit ilmu-ilmu tersebut bernafaskan Islam.

REFERENSI

- Al-Farmawi, A. A.-H. (1961). *Al-Bidayah fi Tafsir al-Maudu'*. al-Hadarah al-Garbiyyah.
- Al-Maudui, A. A. 'I. (1992). *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Mizan.
- al-Muhtasib, A. A.-S. (1973). *Abd al-Majid. Ittijah at-Tafsir fi al-Ashr al-Hadis*. Dar al-Fikr.
- Amin, A. (1972). *Dhuha al-Islam Jilid I (Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Nashr tt*.
- Bakhir, H. (1993). *Republik Islam Iran Menuju Teo Demokrasi*. Gramedia.
- Campbell, T. (1994). *Tujuh Teori Sosial Sketsa Penilaian Perbandingan*. Kanistus.
- Duverger, M. (2003). *Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Sami Darubi dan Jamal Atasi*.
- Esposito, J. L. (1984). *Islam and Politics*. Syrecuse University Press.
- Faruqi, I. (1986). *The Cultural Atlas of Islam*. Mc Miland Publishing Company.
- Husein, O. (1981). *Kultur Islam: Sejarah Perkembangan Kebudayaan dan Pengaruhnya dalam Dunia Islam*. Bulan Bintang.
- Maarif, S. (1997). *Islam: Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat*. Pustaka Pelajar.
- Maarif, S. (1998). *Islam dan Politik di Indonesia*. IAIN Sunan Kalijaga Pers.
- Nasir, M. (1957). *Kesabaran Sebagai Dasar Negara*. Bandung.
- Nasution, H. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Bagian I*. Universitas Indonesia.
- Quinton, A. (1967). *Political Philosophy*. Oxford University Press.
- Salim, A. M. (2002). *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Alquran*. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Q. (1997). *Tafsir Alquran Alkarim*. Pustaka Hidayah.
- Sobari, M. (1996). *Kebudayaan Rakyat: Dimensi Politik dan Agama*. Yayasan Bentang Budaya.
- Taneko, S. (1994). *Sistem Sosial Indonesia*. CV. Fajar Agung.
- Yatim, B. (1996). *Sejarah Peradaban Islam*. Grafindo Persada.